

Submitted: 18 Agustus 2025

Accepted: 25 Agustus 2025

Published: 3 September 2025

Misi Politik GKI di Tanah Papua dalam Proses Pemungutan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tanggal 06 Agustus 2025

Harun Alfius Kaisala

GKI di Tanah Papua

harunalfiuskaisala@gmail.com

Abstrak

Realitas politik di Papua sangat riskan bila ditelusuri secara cermat karena menyisakan berbagai persoalan yang sulit diatasi. Persoalan-persoalan yang dihadapi adalah kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi yang telah berakar juga menjadi akar pahit dalam kehidupan masyarakat Papua. Berbagai usaha untuk mengatasi persoalan politik di Papua seolah menjaring angin, karena para pemangku kepentingan (pejabat pemerintahan dan politik) berlaku skeptis terhadap kondisi sosial itu. Korupsi dan pementingan diri sendiri adalah faktor utama sulitnya upaya menyejahterakan masyarakat. Moralitas dan mentalitas para pejabat daerah tidak bertanggung jawab mengakibatkan terjadinya distorsi politik. Kondisi sosial masyarakat tersebut disebabkan oleh proses-proses demokrasi yang dilaksanakan yang mana ternodai dengan kecurangan, politik uang, dan tindakan-tindakan penyimpangan serupa. Atas dasar itu GKI di Tanah Papua mengambil sikap politik dalam menghadapi proses demokrasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Sikap politik GKI adalah berupaya untuk memberikan surat pengembalaan, serta terlihat bergerak dengan turut langsung memainkan politik praktis. Sikap itu diambil atas pertimbangan bahwa gereja harus bersikap proaktif dalam menentukan kesejahteraan rakyat dengan membela keadilan dan kebenaran. Sikap politik GKI di Tanah Papua merupakan suatu misi yang dilakukan tapi juga perlu diperhatikan bahwa gereja harus mengambil posisi netral dengan tetap mengedepankan politik etis dan profetiknya, agar nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dan gereja sebagai lembaga Allah tetap dijaga kemurniannya sebagai pemegang amanat Allah di dunia.

Kata Kunci: Misi gereja; politik praktis; keadilan; demokrasi, Pemungutan Suara Ulang

PENDAHULUAN

Kenyataan riil perpolitikan di Papua menyisakan banyak dinamika yang sulit dipahami serta diterima secara baik. Persoalan politik telah menjadi kenyataan tak terbantahkan dan terurai panjang tidak terselesaikan sarat ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan diskriminasi, sekalipun upaya demi upaya telah dilakukan mengatasinya. Bentuk-bentuk ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan itu tampak dari wajah Papua yang tidak mengalami perubahan signifikan, sekalipun kekayaan berupa emas, nikel, dan minyak bumi berada di situ.

Kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural dijumpai sebagai realitas di Papua. Eksploitasi alam Papua dengan menguras kekayaan di dalamnya terjadi, tapi pengelolaan sumber-sumber itu tidak dirasakan oleh masyarakat umum, karena kekayaan tersebut tidak dikelola untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Contoh konkret kekayaan alam Papua yang dikuras tapi tidak berdampak bagi masyarakat adalah Freport Mimika yang menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit. Hutan dengan kayu melimpah, sehingga perusahaan-perusahaan kayu atas izin pemerintah, sebagaimana sejumlah tempat wisata dengan sejuta pesona, tetap saja tidak menjamin kebutuhan masyarakat.¹ Selain itu, banyak petani yang lahannya dikuasai oleh para pemilik modal, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian, juga pembiaran terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam kebodohan dan kemalasan karena memiliki etos kerja rendah, tidak peduli dengan pendidikan anak-anak, juga selalu bergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) tanpa berupaya mengubah diri.

Pengkhususan daerah otonomi di Papua tidak mengubah realitas sosial politik sesuai dengan yang diharapkan, karena realitas kemiskinan dan ketidakadilan masyarakat Papua tetap tinggi. Apalagi campur tangan pemerintah pusat terhadap berbagai keputusan daerah masih dominan dirasakan, sehingga otonomi khusus (otsus) terkesan hanya sebagai bentuk politik pemerintah untuk menenangkan masyarakat Papua di tengah gejolak politik di daerah tersebut.² Selain itu, kebanyakan pejabat daerah dengan moral politik rendah memainkan kepentingan politik serong dengan memanipulasi dana otsus yang menyebabkan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dengan nilai triliunan rupiah tidak dinikmati oleh masyarakat akar rumput di Papua. Implikasi dari sikap para pemangku kepentingan tersebut adalah uang rakyat tertahan pada level masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan masyarakat kelas bawah tetap hidup dalam kemiskinan karena tidak merasakan manfaat dari otsus. Sementara itu, tingkat tuntutan ekonomi masyarakat di daerah pedalaman Papua sangat tinggi, sehingga kemampuan masyarakat terbatas dalam memperoleh semua kebutuhan hidup setiap hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Provinsi Papua yang hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 944,49 ribu jiwa pada bulan September 2021. Jumlah tersebut mencapai 27,38 persen dari total populasi. Persentasi tersebut merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya (ini 38 provinsi). Sesuai dengan daerah tempat tinggal, terdapat 895, 26 ribu jiwa penduduk di pedesaan Papua yang hidup di bawah kemiskinan. Jumlah tersebut mencapai 36,5 persen dari total populasi. Hal ini menunjukkan lebih dari sepertiga penduduk di pedesaan Papua hidup miskin. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan Papua berjumlah 49,23 ribu jiwa.³

Realitas Papua dengan segala dinamikanya menunjukkan bahwa proses politik di Papua tidak berlangsung dengan baik. Politik Papua dipenuhi dengan berbagai kepentingan pembesar atau pejabat. Kesalahan itu bermula dari berbagai proses demokrasi yang tidak jujur dan benar dalam menentukan pemimpin di Papua. Politik uang dan politik identitas ditambah dengan kurangnya pengetahuan politik masyarakat menambah parahnya situasi politik di situ. Ini tampak pada setiap momen demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) dan legislatif, yang mana terdapat penyimpangan-penyimpangan semacam itu yang mewarnai proses-proses itu. Masyarakat disodorkan dengan uang yang banyak, juga dipengaruhi isu agama, suku, dan etnis sehingga menjadikan momen demokrasi tersebut tidak berkualitas. Pemimpin bermental korup, tidak bermartabat, tidak pro terhadap masyarakat lahir,

¹ Abraham Abisay, *Implementasi Otonomi Khusus Di Papua* (Papua: PT Yasmin, 2018)., 18.

² Abisay, *Implementasi Otonomi Khusus Di Papua*.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, "Indeks Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2021," *Badan Pusat Statistik Provinsi Papua*, last modified 2020, <http://papua.bps.go.id/publication/2020/10/09/888d6f95b8e270b8736b4992/indeks-demokrasi-provinsi-Papua-tahun-2021.html/> ., 35, diakses pada 18 Mei 2022.

sehingga kesenjangan sosial selalu ada sebagai implikasi buruk yang sulit ditangani.

Pada pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) serentak kepala daerah di seluruh Indonesia yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 di dalamnya ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Kontestasi politik yang berlangsung itu dinilai oleh GKI di Tanah Papua tidak berlangsung secara jujur dan adil, karena banyak terdapat politik uang dan kecurangan sebagai bentuk penyimpangan demokrasi. Terdapat pula berbagai upaya politik kekuasaan yang memenangkan figur tertentu demi kepentingan pembesar. Penilaian itu bukan hanya isu tanpa bukti karena nampak di berbagai tempat. Kendatipun proses demokrasi itu dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) yang dirugikan, tetapi oleh permainan politik, pihak yang kalah membawa persoalan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur (Cawagub) Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mempersoalkan administrasi pendaftaran Cawagub pihak yang menang. Alhasil, MK Indonesia memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 06 Agustus 2025.

Praktik-praktik curang yang dinilai GKI di Tanah Papua sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi mendorong gereja tersebut mengambil langkah untuk ikut bergulat dalam proses demokrasi dengan menyatakan sikap politik mendukung paslon yang terlihat dicurangi. Terlepas dari apakah gereja harus berpolitik praktis atau tidak, GKI telah menyatakan sikapnya. Tentu saja sikap itu dilawan oleh berbagai kalangan karena menilai gereja bukan partai politik. Sikap GKI itu sangat nyata dengan alasan GKI merupakan lembaga yang harus memperjuangkan kepentingan rakyat. GKI harus berani menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah situasi politik di Papua yang tidak stabil. GKI harus pro terhadap orang yang bisa memimpin dengan tanggung jawab dan memiliki jiwa patriot untuk melayani masyarakat secara jujur dan benar. Sekalipun demikian, GKI harus mampu memosisikan diri sebagai lembaga independen yang tidak harus berpihak tetapi tetap harus menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati.⁴ Alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena permasalahan bersifat holistik, dinamis, dan penuh makna.⁵ Dalam tulisan ini, penulis bermaksud untuk memahami situasi secara mendalam, serta menemukan pola dan teori. Sehubungan dengan itu, studi kepustakaan dilakukan pula terkait dengan permasalahan dan lingkup penelitian, nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁶ Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data dan pustaka yang mencakup membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian seperti tulisan-tulis mengenai politik dan gereja.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Misi GKI Dalam Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur

Bagaimana misi gereja di ranah politik? Tentunya dengan mendasarkan segala teori dan aksi pada *Missio Dei*, sehingga prioritasnya adalah kehendak Allah bukan kehendak gereja atau pihak-pihak tertentu. Pentingnya misi politik dalam menyikapi realitas politik di Papua menjadi suatu keharusan sebagai tanggung jawab bersama. GKI di Tanah Papua sebagai bagian integral dari negara Indonesia ikut serta mengambil peran politik melalui berbagai ketetapan sebagai wujud partisipasinya

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2018), 453.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 452.

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 3.

dalam menjawab fenomena sosial politik itu. Sikap GKI adalah suatu kesadaran politik gereja yang termanifestasi lewat peran profetiknya di dunia. Kesadaran itu mendorong gereja untuk berpikir dan bertindak kritis dalam menyikapi kenyataan di lingkungan di mana gereja itu berada.

Atas refleksi dan kesadaran GKI dalam melihat kenyataan politik Papua, maka upaya peran politik gereja terus dilakukan sebagai suatu misi gereja untuk menghadirkan Kerajaan Allah di bumi. Politik memang bukan hanya tanggung jawab gereja, tapi gereja terpanggil untuk terlibat di dalam politik sebagai bentuk misi gereja. Gereja sebagai institusi perlu terus-menerus menilai dan menyikapi politik berdasarkan prinsip-prinsip yang gereja terima sebagai perintah dari Tuhan. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa Allah berpolitik dalam politik keteraturan, kesejahteraan, dan keadilan. Ia mengubah kekacauan dunia menjadi keteraturan semesta (Kej. 1 dan 2). Demikian juga Yesus, yang tidak berpolitik praktis, tapi Ia tidak bersikap anti-politik. Justru Yesus membangun tatanan politik baru yang tidak berorientasi pada kekuasaan, melainkan melalui penguatan dan pendampingan bagi masyarakat akar rumput.

Gereja memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan iman (kepercayaan) dengan isu politik tertentu sehingga dapat menjawab kebutuhan dari warga jemaatnya.⁸ Banyaknya isu politik yang muncul sering kali membuat warga jemaat menjadi bingung. Sering kali mereka kemudian kehilangan pegangan mengenai bagaimana cara menyikapi isu-isu tersebut. Gereja adalah institusi manusia yang didiami oleh orang-orang berdosa dengan pengetahuan yang terbatas. Namun bukan berarti bahwa gereja boleh membatasi dirinya untuk tidak memberikan informasi bagi jemaatnya, hanya karena keterbatasan tersebut. Sebaliknya, gereja harus terus mencari informasi aktual dan menginformasikannya secara kompeten.⁹

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua juga merupakan tanggung jawab gereja. Maraknya isu politik di Papua dengan dinamika politik yang kompleks seperti politik uang dan berbagai kampanye hitam, serta adanya eksploitasi alam lingkungan, juga kekuatiran terhadap prospek dan kinerja pemimpin ke depan memaksa GKI untuk menentukan arah politiknya untuk mendukung salah satu kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Sikap politik itu menimbulkan riak sosial. Sikap itu membuat GKI dilabeli organisasi partai politik yang terang-terangan memainkan peran politik praktis yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Alasan GKI terjun bebas dalam proses politik demokrasi PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 06 Agustus 2025 adalah terjadinya distorsi politik demokrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan sebelum waktu pelaksanaan PSU itu.¹⁰ Permainan politik kotor dirancang secara sistematis sudah terbaca oleh publik di Papua. Tentu saja praktik politik tersebut merupakan penyimpangan demokrasi yang mesti dilawan. Oleh karena itu, secara kelembagaan dalam hal ini GKI Di Tanah Papua bersikap progresif melawan dengan upaya menyatakan kebenaran dan keadilan. Bentuk sikap politik GKI adalah menerbitkan surat penggembalaan tentang pentingnya demokrasi yang adil dan damai, serta melakukan terobosan dalam menentukan figur tertentu karena dinilai baik dalam orientasi Pembangunan Papua ke depan. Sikap politik gereja tersebut merupakan sikap kritis GKI dalam menyatakan kebenaran, tapi di sisi lain GKI mesti memosisikan diri hanya sebagai kontrol sosial yang dapat mengawasi pemerintah dalam menyelenggarakan demokrasi. Adapun politik gereja adalah politik profetik yakni bagaimana gereja menyuarakan kebenaran dan keadilan apabila kebenaran dan keadilan tidak ditegakkan.

Kehadiran gereja dalam politik bersifat kritis dan konstruktif. Christopher Wright menyatakan

⁸ J. Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2000), 265.

⁹ Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*.

¹⁰ Pernyataan Badan Pekerja Sonode GKI dalam Pertemuan Pegawai Oroganik GKI Wilayah 1 di Kantor Sinode Kota Raja dalam Jayapura.

bahwa respons gereja ada dalam dua sisi. Pada satu sisi, gereja dipanggil kepada keterlibatan konstruktif dalam dunia. Namun, di sisi lainnya, gereja dipanggil kepada konfrontasi yang berani dengan dunia. Tantangan misi gereja dan orang Kristen adalah hidup dalam ketegangan konstan untuk senantiasa memberlakukan keduanya secara sekaligus.¹¹ Ini berarti bahwa gereja harus terlibat dan berkontribusi dalam dunia politik. Gereja tidak harus menjadi organisasi politik, tetapi peran politik gereja harus dimainkan dalam menegakkan keadilan, perdamaian, dan kehidupan bersama. Gereja harus turut menentukan pilihan politiknya dengan tetap berpedoman pada kaidah dan norma. Upaya politik gereja adalah bagaimana umat disadarkan tentang politik yang berpihak pada kehidupan bersama, agar umat dapat menentukan pilihan-pilihan politiknya secara benar.

Sikap Politik Gereja sebagai Misi Gereja

Eksistensi gereja dalam menyikapi berbagai persoalan sosial politik merupakan tanggung jawab dari Allah. Menurut Dietrich Bonhoeffer, setiap lembaga yang ditegakkan oleh Allah dengan sendirinya memiliki sebuah mandat Ilahi. Terkait dengan mandat Allah yang diberikan, menurut Bonhoeffer, gereja sebagai suatu individu dan instansi mau tidak mau harus bersifat politik, walaupun panggilan utama gereja bukan untuk berpolitik. Dengan kata lain, gereja akan senantiasa bersifat politik walau gereja tidak berpolitik secara langsung.¹²

Bagi Bonhoeffer, keterlibatan langsung gereja dalam arena politik tidak hanya mengingatkan negara soal batas-batas kekuasaan yang dimilikinya, tetapi juga berupa tindakan sosial yang secara konkret dapat gereja lakukan. Bonhoeffer berpendapat bahwa gereja harus membantu para korban politik negara, siapapun orangnya. Gereja wajib mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Dalam melakukan bantuan kemanusiaan, gereja tidak boleh membedakan korban politik tersebut baik orang Kristen atau bukan Kristen, anggota politik A atau anggota politik B.¹³

Atas pernyataan Bonhoeffer tentang mandat Ilahi sedemikian, maka upaya gereja untuk menangani dan mengadvokasi berbagai penyimpangan kebijakan publik, juga turut serta dalam merasakan penderitaan umat adalah tugas kewajiban gereja yang harus dimaknai berasal dari Allah sebagai Pemberi mandat. GKI di Tanah Papua sebagai institusi sosial berhadapan dengan realitas politik yang tidak stabil yang dapat berdampak pada kemiskinan, kebodohan, keterisolasian, diskriminasi, dan ketidakadilan. Realitas itu yang disebut oleh Heitink bahwa politik melingkupi segala sesuatu, termasuk kemiskinan dan yang tertindas. Hal ini dapat dijumpai dari kata-kata, seperti: pemilihan, solidaritas, protes, dan memihak.¹⁴

Kemiskinan dan ketidakadilan sosial di Papua merupakan sebuah kenyataan riil yang juga dapat digolongkan sebagai masalah politik yang perlu mendapat perhatian oleh GKI. Partisipasi GKI dilakukan dengan upaya bersama masyarakat untuk berjuang untuk menangani semua persoalan itu. Tentu saja yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial, seperti: kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang merupakan pengumpulan bangsa dan gereja. Semuanya tidak hanya ditentukan oleh masyarakat, tetapi juga pemerintah dalam hal ini pemimpin yang adalah produk demokrasi. Demokrasi yang melahirkan pemimpin berkualitas, bermoral, dan beretika akan menciptakan kehidupan masyarakat yang berkualitas juga, begitu sebaliknya.

¹¹ J.H. Christopher Wright, *Misi Umat Allah: Sebuah Teologi Biblika Tentang Misi Gereja* (Terj. *The Mission of God's People Yang Diterjemahkan Oleh James Pantou, Dkk.*) (Jakarta: Literatur Perkantas, 2013), 295.

¹² Wright, *Misi Umat Allah: Sebuah Teologi Biblika Tentang Misi Gereja* (Terj. *The Mission of God's People Yang Diterjemahkan Oleh James Pantou, Dkk.*), 134.

¹³ Wright, *Misi Umat Allah: Sebuah Teologi Biblika Tentang Misi Gereja* (Terj. *The Mission of God's People Yang Diterjemahkan Oleh James Pantou, Dkk.*), 135.

¹⁴ Heitink, *Teologi Pastoral Transformatif* (Diktat Kuliah Pascasarjana S2 Teologi Kristen Protestan UKIM Ambon Tahun 2022), 2022.

Pergumulan besar di Papua adalah soal mentalitas para pemimpin yang tidak pro terhadap rakyat. Pemimpin demi pemimpin berganti tapi realitas Papua tetap sama dalam berbagai segi pembangunan. Eksploitasi hak-hak masyarakat seperti tanah adat dikelola oleh perusahaan-perusahaan dengan sewenang-wenang tanpa ada advokasi pemerintah daerah. Semua itu disebabkan oleh para pejabat yang ikut terkooptasi sehingga diam membisu.

Beberapa tahun silam di Demta Kabupaten Jayapura, tanah-tanah dalam ukuran besar dibeli oleh PT Yulim Sari untuk dijadikan perusahaan kayu hanya dengan *tape recorder* kepada para tuan tanah. Bahkan, hutan mangrove dibeli oleh PT Texmaco dengan paksaan (halus ataupun kasar) dari rakyat setempat dengan harga yang begitu rendah. Menurut rakyat setempat, harga per meter hutan setempat itu lebih murah dibanding harga sebuah kelapa kering di pasar. Rakyat kecil pemilik hutan-hutan di Papua tidak menyadari bahwa hutan ulayat mereka telah dikapling-kapling oleh orang-orang pemilik modal untuk menjadi milik mereka dan pemilik hutan dipandang sebagai penunggu hutan saja.¹⁵

Ketimpangan sosial politik tersebut mesti direspons oleh gereja lewat peran aktifnya. Pembebasan sosial bagi yang miskin, bodoh, dan tidak adil harus dilakoni oleh gereja sebagai manifestasi misi Allah di dunia. Misi itu harus dipandang sebagai sesuatu yang berarti bagi Allah sehingga tidak akan pernah dibuang oleh Allah, sebab pemaknaan itu juga terkait solidaritas Allah yang terlihat melalui gereja. Misi gereja dalam konteks sosial politik adalah misi yang utuh dengan suara dan keterlibatan nyata dalam perjuangan kemanusiaan untuk ikut menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.

Tentunya GKI menyadari bahwa gereja berada di dalam dunia dengan dinamika sosial politik yang serba tidak menentu dan membutuhkan campur tangan solidaritas gereja itu sendiri. Oleh karena itu, perjumpaan gereja dengan orang miskin dan terpinggirkan harus dimaknai sebagai suatu perjumpaan dengan Allah (Mat 25:36). Perjumpaan dengan Allah turut ada dalam realitas kemiskinan itu. Oleh sebab itu, peran gereja dalam melepaskan umat yang menderita, miskin, bodoh, dan terisolasi itu menggambarkan Allah yang turut solidier melalui gereja itu. Terhadap hal itu keterlibatan gereja di ranah politik turut memberi warna tersendiri. Keterlibatan GKI dalam proses demokrasi memberikan seruan penggembalaan, bahkan turut berupaya memperjuangkan salah satu kandidat yang menurut GKI mampu menjadi pemimpin, melakukan restorasi, serta revitalisasi peran pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial adalah suatu cara berteologi yang konkret.

Peran GKI menentukan arah politiknya sudah seharusnya sebagai bentuk partisipasi lembaga gereja dalam merespons realitas sosial masyarakat di Papua. Peran itu merupakan suatu tanggung jawab dan amanat dari Allah bagi gereja untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia. Peran-peran itu yang disebut Bonhoeffer sebagai misi Allah yang diwujudkan oleh gereja di dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap persoalan tentang misi GKI Di Tanah Papua dalam proses PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, maka hal yang dapat disimpulkan yakni GKI di Tanah Papua sebagai institusi gerejawi dalam menyikapi PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah berupaya dalam memainkan fungsi politik profetisnya, juga bersuara dan bertindak dalam menyikapi bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidakbenaran. Sikap politik GKI itu nampak lewat *bargaining* politik GKI dalam PSU. Langkah GKI itu menjadi suatu misi perwujudan Papua yang aman dan damai, sebab para politikus dan pejabat daerah sudah dinilai bergeser dari nilai-nilai demokrasi. Sikap politik itu dilakukan, karena Injil tidak hanya berbicara tentang keselamatan jiwa, tetapi juga tentang

¹⁵ Socrates Sofyan Yoman, *Otonomi Khusus Papua Telah Gagal* (Jayapura: Cenrerwasi Pers, 2012)., 33.

pembaharuan hidup, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, gereja terpenggil dalam memperjuangkan nilai-nilai Kerajaan Allah (keadilan, kasih, dan damai sejahtera) dalam kehidupan masyarakat, termasuk ranah politik. Meskipun demikian, kesadaran penting yang perlu terbangun dalam keterlibatan GKI dalam politik sedemikian adalah politik sebagai misi GKI di Tanah Papua mestinya diletakkan pada koridor dan peran politik gereja yang harus terkontrol, bersikap netral, dan tetap menyuarakan keadilan dan kebenaran. Sikap politik yang dimainkan seharusnya bersifat etik profetik. Politik gereja adalah politik yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam terang Alkitab sebagai landasan moral dan etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisay, Abraham. *Implementasi Otonomi Khusus Di Papua*. Papua: PT Yasmin, 2018.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. "Indeks Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2021." *Badan Pusat Statistik Provinsi Papua*. Last modified 2020.
<http://papua.bps.go.id/publication/2020/10/09/888d6f95b8e270b8736b4992/indeks-demokrasi-provinsi-Papua-tahun-2021.html/> .
- Heitink. *Teologi Pastoral Transformatif (Diktat Kuliah Pascasarjana S2 Teologi Kristen Protestan UKIM Ambon Tahun 2022)*, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Wogaman, J. Philip. *Christian Perspectives on Politics*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2000.
- Wright, J.H. Christopher. *Misi Umat Allah: Sebuah Teologi Biblikal Tentang Misi Gereja (Terj. The Mission of God's People Yang Diterjemahkan Oleh James Pantou, Dkk.)*. Jakarta: Literatur Perkantas, 2013.
- Yoman, Socrates Sofyan. *Otonomi Khusus Papua Telah Gagal*. Jayapura: Cenerwasi Pers, 2012.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.